

## **Pengembangan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Aset dan Inventaris BUMDes untuk Meningkatkan Akuntabilitas**

**Fitriyah<sup>1</sup>, Devina Utami<sup>2</sup>, Eny Suryani<sup>3</sup>**

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01252@unpam.ac.id<sup>1</sup>, dosen02140@unpam.ac.id<sup>2</sup>, dosen01749@unpam.ac.id<sup>3</sup>

**Submitted:** 11<sup>th</sup> May 2026 | **Edited:** 30<sup>th</sup> June 2026 | **Issued:** 01<sup>st</sup> July 2026

**Cited on:** Fitriyah, F., Utami, D., & Suryani, E. (2026). Pengembangan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Aset dan Inventaris BUMDes untuk Meningkatkan Akuntabilitas. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 6(2), 801-809.

### **ABSTRACT**

Village-Owned Enterprises (BUMDes) play an important role in supporting village economic development through the independent and sustainable management of local potential. However, asset and inventory management in BUMDes still faces various challenges, particularly in asset recording, classification, and inventory administration, which remain unstructured. This condition was also found in BUMDes Sadeng Village, Sukanegara District, Bogor Regency, West Java. The main problems include manual asset recording, the absence of a clear inventory system, and limited understanding among managers of the importance of accountability in village asset management. Therefore, this Community Service Program aimed to develop an accounting system for managing BUMDes assets and inventories to improve organizational transparency and accountability. The activity was conducted on Friday, April 24, 2026, at the Sadeng Village Hall, involving BUMDes managers, village officials, and community members engaged in managing village business units. The implementation method employed an educational, participatory, and hands-on approach through observation, counseling, training, and assistance in asset and inventory administration. The results showed improved participants' understanding and ability to manage assets systematically and effectively. The activity also produced asset and inventory administration formats that can be used sustainably by BUMDes. The developed accounting system is expected to support more professional, transparent, and accountable organizational governance and strengthen public trust in BUMDes management.

**Keywords:** Accounting System, Asset Management, Inventory, BUMDes, Accountability

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi dan sumber daya lokal (Anggraeni et al., 2021; Prasetyo et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan unit usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, administrasi, dan pertanggungjawaban organisasi. Sari dan Sudana (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial BUMDes berkaitan dengan praktik transparansi, integritas, konsistensi, partisipasi, dan

keberlanjutan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Namun, penerapan tata kelola yang baik pada BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, termasuk belum optimalnya praktik akuntansi dan akuntabilitas keuangan (Titania & Utami, 2021). Kondisi tersebut menjadi relevan pada BUMDes Desa Sadeng, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Bogor, yang berdasarkan hasil observasi awal masih menghadapi persoalan pencatatan aset secara manual, belum terintegrasinya data inventaris, belum seragamnya klasifikasi aset, serta keterbatasan pemahaman pengelola dalam menerapkan administrasi aset secara sistematis. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas unit usaha dan kebutuhan pengurus terhadap informasi aset yang akurat dan mudah ditelusuri.

Permasalahan pengelolaan aset di BUMDes Desa Sadeng tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan, tetapi juga berhubungan dengan pengendalian internal dan kualitas tata kelola organisasi. Utami dan Rusdianto (2023) menemukan bahwa BUMDes dapat memiliki kegiatan pembukuan dan pelaporan rutin, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan laporan yang sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan dan pengendalian yang memadai. Hal serupa terlihat dalam penelitian Apriliasari et al. (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan laporan keuangan dan aset BUMDes masih belum optimal. Dari perspektif tata kelola, Sofyani et al. (2020) menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan BUMDes, sedangkan Afandi (2022) menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan BUMDes membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan karakteristik sasaran kegiatan yang terdiri atas pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam unit usaha desa, peningkatan kapasitas administrasi aset perlu dilakukan melalui pendekatan yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kemampuan peserta. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini diarahkan untuk membantu peserta memahami proses identifikasi, klasifikasi, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan aset serta inventaris secara lebih terstruktur.

Secara teoritis, sistem akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang relevan, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengendalian serta pengambilan keputusan. Dalam konteks BUMDes, sistem pencatatan aset yang baik diperlukan agar setiap aset dapat diidentifikasi, diklasifikasikan,

didokumentasikan, dan dipantau kondisinya secara berkelanjutan. Hapsari et al. (2020) menjelaskan bahwa pencapaian akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes membutuhkan kemauan dan kemampuan organisasi untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban secara nyata. Sofyani et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi pengelola dan komitmen organisasi memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas, sementara transparansi berhubungan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat. Pada tingkat pengelolaan desa, Oktari et al. (2022) menemukan bahwa faktor internal dan eksternal organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dan kinerja. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu disertai dengan penyediaan sistem administrasi yang sederhana dan mudah diterapkan. Dalam konteks kegiatan ini, penggunaan format pencatatan berbasis spreadsheet menjadi salah satu alternatif yang relevan karena dapat membantu pengelola melakukan pembaruan data, klasifikasi aset, pencatatan kondisi, dan penyusunan daftar inventaris secara lebih efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sistem akuntansi dalam pengelolaan aset dan inventaris BUMDes Desa Sadeng menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi secara praktis dan berkelanjutan. Sistem yang dikembangkan tidak hanya diarahkan pada pembuatan format pencatatan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta melalui penyuluhan, praktik inventarisasi, serta pendampingan penggunaan administrasi digital. Hapsari et al. (2020) menempatkan akuntabilitas sebagai bagian penting dari tata kelola BUMDes, sedangkan Sari dan Sudana (2020) menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam proses pengelolaan organisasi. Penguatan sistem administrasi juga diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kehilangan informasi, dan lemahnya pengawasan aset. Dengan demikian, kegiatan PKM ini bertujuan mengembangkan sistem akuntansi aset dan inventaris yang sederhana, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan BUMDes Desa Sadeng, sekaligus meningkatkan kompetensi pengurus, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan unit usaha. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta administrasi aset yang lebih tertib dan mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan praktik langsung. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi mengenai konsep dasar aset dan inventaris, klasifikasi aset, pencatatan aset, serta hubungan pengelolaan aset dengan akuntabilitas organisasi. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan serta menyusun administrasi aset. Sementara itu, praktik langsung dilakukan melalui latihan inventarisasi, pemberian kode aset, penyusunan daftar inventaris, dan penggunaan format pencatatan berbasis digital sederhana.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Desa Sadeng dan pengurus BUMDes, kemudian dilanjutkan dengan observasi kondisi pengelolaan aset dan inventaris. Hasil observasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi dan perangkat administrasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 24 April 2026 di Aula Balai Desa Sadeng, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui rangkaian penyampaian materi, diskusi, praktik inventarisasi, dan pendampingan penggunaan spreadsheet untuk pencatatan aset. Peserta sasaran utama adalah pengurus BUMDes, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan unit usaha desa.

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui pendampingan dan evaluasi penerapan administrasi aset secara sederhana dan sistematis. Peserta dilatih untuk menginput data aset, memperbarui kondisi aset, serta menyusun laporan inventaris menggunakan format digital yang telah disiapkan. Sebagai bentuk keberlanjutan, tim pengabdian menyerahkan format administrasi aset, kartu inventaris, dan SOP pengelolaan inventaris kepada pengurus BUMDes untuk digunakan dalam kegiatan administrasi selanjutnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelola dalam menciptakan pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

## **PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di BUMDes Desa Sadeng menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan aset dan inventaris tidak hanya berkaitan dengan belum tersedianya format pencatatan, tetapi juga dengan

keterbatasan pemahaman pengelola mengenai pentingnya administrasi aset yang sistematis. Sebelum kegiatan, pencatatan masih dilakukan secara manual, data inventaris belum terstruktur, dan klasifikasi aset belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai keberadaan, kondisi, dan status aset belum mudah ditelusuri ketika diperlukan. Temuan ini sejalan dengan Ahmad et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes pada tingkat desa masih dapat berlangsung secara sederhana, dengan pencatatan yang bersifat umum dan belum sepenuhnya terstruktur. Dengan demikian, hasil observasi pada BUMDes Desa Sadeng memperlihatkan bahwa penguatan administrasi merupakan kebutuhan mendasar sebelum organisasi dapat menerapkan sistem pengelolaan aset yang lebih kompleks.

Penyampaian materi secara edukatif memberikan pemahaman kepada peserta mengenai hubungan antara pengelolaan aset, sistem akuntansi, dan akuntabilitas organisasi. Peserta tidak hanya diperkenalkan pada pengertian aset dan inventaris, tetapi juga diarahkan untuk memahami bahwa setiap aset yang dimiliki atau dikelola BUMDes perlu dicatat, diklasifikasikan, dipelihara, dan dipertanggungjawabkan. Perubahan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dari hasil kegiatan karena sistem administrasi tidak akan berjalan secara optimal apabila pengelolanya belum memahami tujuan dan manfaat pencatatan. Puspitasari dan Adi (2023) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes masih memerlukan penguatan melalui peran pemerintah sebagai regulator dan pembina. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengelola melalui kegiatan edukasi dan pendampingan merupakan bagian penting dalam membangun praktik akuntabilitas pada BUMDes.

Hasil praktik inventarisasi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan praktik langsung lebih mudah diterapkan oleh peserta dibandingkan penyampaian materi yang hanya bersifat teoritis. Peserta secara langsung melakukan identifikasi aset, menyusun daftar inventaris, memberikan kode aset, mencatat kondisi barang, dan memasukkan informasi tersebut ke dalam format administrasi yang telah disiapkan. Proses tersebut membantu peserta memahami tahapan pengelolaan aset mulai dari identifikasi sampai dokumentasi. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pemberian contoh yang konkret dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pengetahuan akuntansi dengan praktik administrasi sehari-hari. Utami et al. (2022) menekankan bahwa kepemimpinan dan kemampuan pengelola memiliki peran dalam mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, praktik langsung yang disertai pendampingan menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menjalankan sistem administrasi aset.

Salah satu hasil penting kegiatan adalah tersusunnya format administrasi aset dan inventaris yang lebih sederhana dan sistematis. Format tersebut mencakup pencatatan identitas aset, klasifikasi, kode barang, kondisi aset, serta informasi lain yang diperlukan untuk memudahkan pengawasan. Penyediaan format yang sederhana menjadi penting karena sistem yang terlalu kompleks berpotensi sulit diterapkan oleh pengelola BUMDes dengan kemampuan akuntansi yang terbatas. Diyanto dan Musfi (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan BUMDes dapat membantu pengelola menghasilkan informasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, format administrasi yang dihasilkan melalui kegiatan PKM ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pencatatan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian yang dapat membantu pengurus mengetahui kondisi dan keberadaan aset secara lebih teratur.

Penggunaan spreadsheet sederhana dalam kegiatan juga memberikan alternatif bagi BUMDes untuk mulai melakukan transisi dari pencatatan manual menuju administrasi berbasis digital. Peserta dilatih untuk memasukkan data aset, memperbarui kondisi barang, dan menyusun daftar inventaris menggunakan format yang telah disediakan. Penggunaan teknologi yang sederhana dipilih agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta sehingga sistem dapat diterapkan setelah kegiatan selesai. Shulthoni et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan pada BUMDes dapat menjadi sarana untuk menghasilkan proses pelaporan yang lebih relevan dan akuntabel. Namun, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat atau format aplikasi; keberhasilannya membutuhkan pemahaman pengguna dan konsistensi dalam melakukan pembaruan data. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan menjadi faktor penting agar sistem digital yang diperkenalkan dapat benar-benar digunakan dalam aktivitas administrasi BUMDes.

Dari perspektif akuntabilitas, penerapan sistem pencatatan aset yang lebih terstruktur memberikan manfaat terhadap transparansi dan pengawasan internal BUMDes. Data aset yang terdokumentasi dengan baik dapat memudahkan pengurus

maupun pemerintah desa dalam melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kondisi aset. Sistem tersebut juga dapat mengurangi risiko kehilangan informasi, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam menelusuri penggunaan aset. Temuan ini relevan dengan penelitian Taengetan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes masih menghadapi kelemahan pada tahapan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, Putra et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan kompetensi pengelola dalam memahami perlakuan akuntansi BUMDes menjadi salah satu persoalan dalam penerapan akuntabilitas. Oleh karena itu, hasil kegiatan PKM di Desa Sadeng menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola dan penyediaan instrumen administrasi yang mudah digunakan merupakan dua aspek yang perlu berjalan secara bersamaan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM menghasilkan perubahan positif berupa meningkatnya pemahaman peserta, tersedianya format administrasi aset dan inventaris, serta mulai diperkenalkannya pencatatan berbasis digital sederhana kepada pengelola BUMDes Desa Sadeng. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif, partisipatif, dan praktik langsung dapat digunakan untuk menjembatani kebutuhan BUMDes terhadap sistem akuntansi yang sederhana dan aplikatif. Meskipun demikian, keberlanjutan hasil kegiatan sangat bergantung pada konsistensi pengurus dalam menggunakan dan memperbaiki sistem yang telah dikembangkan. Temuan ini sejalan dengan Ismail et al. (2026) yang dalam kajian mengenai tata kelola BUMDes menempatkan praktik akuntansi, akuntabilitas, dan tata kelola sebagai aspek yang masih memerlukan penguatan. Dengan adanya format administrasi, SOP, dan pendampingan yang telah diberikan, BUMDes Desa Sadeng memiliki dasar yang lebih baik untuk membangun pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan kegiatan usaha desa.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada BUMDes Desa Sadeng menunjukkan bahwa penguatan sistem akuntansi dalam pengelolaan aset dan inventaris merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi desa. Permasalahan pencatatan manual, belum terstruktur nya klasifikasi aset, keterbatasan administrasi, dan rendahnya pemahaman pengelola dapat diatasi melalui pendekatan

edukatif, partisipatif, dan praktik langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Kegiatan ini memberikan kontribusi melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes, perangkat desa, serta masyarakat dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat, dan mengawasi aset secara lebih sistematis. Selain itu, tersedianya format administrasi aset, SOP inventaris, dan pencatatan berbasis spreadsheet sederhana menjadi instrumen pendukung yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Implementasi sistem tersebut berimplikasi pada meningkatnya ketertiban administrasi, transparansi informasi aset, efektivitas pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Keberlanjutan program memerlukan konsistensi penggunaan sistem, pembaruan data secara berkala, serta pendampingan dan evaluasi secara periodik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2022). Penguatan pengelolaan BUMDes “Harta Sadesa” di Desa Katapang Kabupaten Bandung melalui model collaborative governance. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 19(2), 176–189.
- Ahmad, A. R. N., Amaliah, T. H., & Husain, S. P. (2024). Analisis pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tombulang Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1255–1264.
- Anggraeni, M. R. R. S., Suartana, I. W., & Wirajaya, I. G. A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 1–12.
- Apriliasari, K., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2022). Transparansi pengelolaan pada laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa (Studi kasus BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(9).
- Diyanto, V., & Musfi, P. N. (2022). Digitalization of financial reports of Village-Owned Enterprises. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(3), 205–210.
- Hapsari, A. N. S., Utami, I., & Kean, Y. W. (2020). Accountability in governance: Will and can traditional village-owned enterprises achieve it? *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 215–222.
- Ismail, S., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2026). Governance, accountability, and accounting practices in Village-Owned Enterprises (BUMDes): A scoping review. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 5(6).
- Oktari, V., Zarefar, A., Afifah, U., & Khoiriyah, M. (2022). Village fund management accountability and its implications on village government performance. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2), 263–279.
- Prasetyo, R. A., Suryanto, T., & Suharto, S. (2022). Village-owned enterprises and rural economic development: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(4), 245–255.

- Puspitasari, M., & Adi, P. H. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes: Sebuah perspektif peran pemerintah. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 21–41.
- Putra, N. B., Rusliyawati, R., Damayanti, F., & Ardimansyah, A. (2024). Uncovering the meaning of accountability: Is the Village-Owned Enterprises (BUMDes) accountable? *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 12(1).
- Sari, D. M. M. Y., & Sudana, I. P. (2020). Managerial accountability of Village-Owned Enterprise Wija Sari: A case study research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 152–171.
- Shulthoni, M., Mulyono, R. D. A. P., Roziq, A., Singgih, M., Farid, M., & Prasetyo, H. (2022). Escalation of village enterprises in developing digitalized financial management innovations in the Tapal Kuda area. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(1), 42–49.
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418.
- Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan institusional dalam praktik tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 111–134.
- Taengetan, E., Manossoh, H., & Tirayoh, V. (2023). Analysis of accountability and transparency in financial management Village-Owned Enterprises (BUMDes) Tinarangen Niampak, Beo Selatan District, Talaud Islands District. *Accountability*, 11(2).
- Titania, N. K., & Utami, I. (2021). Apakah BUMDes sudah taat pada good governance? *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 77–84.
- Utami, B. B. K., & Rusdianto, R. (2023). Financial governance and internal control system overview in pioneer village-owned enterprises. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 7(1).
- Utami, I., Hapsari, A. N. S., & Kean, Y. Y. W. (2022). Leadership in realizing financial management accountability for Village-Owned Enterprises. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 99–112.